

## Efek Pemilukada Serentak



### *Alamsyah*

Dosen Ilmu Administrasi Negara  
FISIP Universitas Sriwijaya

Siang itu, ba'da zuhur, saya kedatangan tamu. Teman lama yang kini menjadi pengurus parpol di Sumatera Selatan. Ia bercerita tentang parpolnya yang mulai berbenah menyambut Pileg 2014. Niatnya bertemu siang itu adalah ingin diskusi soal perkembangan realitas politik Pilgub Sumsel 2013 yang menurutnya aneh dan membingungkan. Untuk menggambarkan situasi keanehan pemilukada serentak itu, ia menceritakan kasus Pilgub Sumsel 2013 dan Pilbup OKI.

Di Pilgub Sumsel, ujanya mengawali cerita, Alex Nurdin (Partai Golkar) yang berstatus *incumbent* berpasangan dengan Ishak Mekki (Partai Demokrat). Di saat yang bersamaan, diasumsikan, Partai Golkar akan mengusung Zaitun (putri Mawardi Yahya, tokoh Partai Golkar Ogan Ilir). Sedangkan Partai Demokrat OKI akan mengusung Tartilla Ishak Mekki (Ketua Partai Demokrat OKI dan isteri Ishak Mekki).

Dalam situasi ini, lanjutnya, ketika musim kampanye pemilukada tiba, Alex Nurdin (Partai Golkar) pasti akan mengajak massa pemilih memilih dirinya dan Zaitun (kandidat Bupati OKI yang diusung Partai Golkar). Di saat yang bersamaan, Ishak Mekki akan mengajak para pemilih untuk memilih dirinya dan Tartilla (kandidat Bupati OKI yang didukung Partai Demokrat). Sebagai orang parpol, katanya, saya belum menemukan formula kampanye dan strategi pendekatan kepada para pemilih. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Anda sebagai akademisi terhadap situasi ini? Saya kaget disodori pertanyaan yang sangat serius ini. Saya katakan kepadanya, saya akan jawab pertanyaan di atas dalam perspektif non-partisan. Inilah jawaban saya atas persoalan tersebut.

*Pertama*, jika disederhanakan, kasus di atas dapat dianalogikan dengan istilah ular yang memiliki satu kepala dengan dua ekor. Di tempat lain, ada kemungkinan ekornya lebih dari dua. Kepala ular bisa mengigit, ekor ular bisa membelit. Kepala dan ekor ular sama-sama mengancam dan berbahaya. Karena dua ekor ular tidak mungkin bersatu, maka dalam konteks kampanye Pilgub Sumsel dan Pilbup OKI, strategi segitiga bisa dimainkan. Ketika kepala ular ada di Kota Kayu Agung, ekor yang satu ada di Tulung Selapan dan ekor lainnya ada di Tanjung Lubuk.

Dari sisi pendanaan kampanye, strategi ini jelas tidak ekonomis. Idealnya, ketika gubernur dan wakil gubernur kampanye di satu titik, maka kandidat bupati dan wakil bupati juga turut hadir dan berkampanye. Ibarat kata pepatah Melayu, sekali dayung, dua tiga pulau terlampui. Dari sisi politik, strategi ini yang paling mungkin dilaksanakan. Sebab, sangat mustahil pendukung Tartilla (kandidat Partai Demokrat) bisa berkumpul dalam satu *event* kampanye dengan pendukung Zaitun (kandidat Partai Golkar) meskipun dalam *event* tersebut ada Alex Nurdin dan Ishak Mekki. Di Indonesia, perilaku elit politik dan massa pemilih itu berbeda 100 derajat. Bagi elit politik, pagi hari mereka terlibat konflik dengan sesama elit, ba'da zuhur mereka bisa tertawa di meja makan. Sebaliknya, bagi massa pemilih, pagi hari konflik, besok dan lusa akan tetap konflik.

Selain itu, saya kira, teman-teman parpol paham betul bahwa semangat pemilukada serentak adalah untuk menghemat dana publik yang digunakan KPU dalam penyelenggaraan

pemilukada, dan bukan efisiensi biaya politik kandidat. Artinya, ketika pemilukada dilaksanakan serentak menyebabkan biaya politik kandidat semakin tinggi, maka inilah resiko politik yang harus ditanggung para kandidat.

*Kedua*, KPU sangat benar ketika mengatakan bahwa pelaksanaan pemilukada serentak akan menghemat biaya. Yang tidak mereka perhitungkan adalah konsekuensi keputusan tersebut terhadap para pemilih. Di Indonesia, mayoritas pemilih termasuk dalam kategori pemilih emosional. Mereka bahkan tidak bisa membedakan maksud, tujuan, dan fungsi setiap kertas suara. Dalam Pileg 2009, sebagai contoh, banyak sekali calon anggota DPD RI yang terpilih akibat nomornya sama dengan nomor partai politik besar (*misalnya*, Partai Demokrat, PDIP, dan Partai Golkar). Situasi ini akan terulang jika tim pemenang para kandidat tidak bekerja ekstra keras untuk mendidik para pemilih tentang bagaimana memilah surat suara dan memilih kandidat di bilik suara. Tugas ini tidak bisa dibebankan kepada KPU sebagai penyelenggara. Sebab, porsi KPU hanya sebatas menginformasikan tata cara mencoblos surat suara di TPS dan bukan soal bagaimana memilih dengan tepat dan cermat.

*Ketiga*, secara teoritis, ada banyak model teoritis yang dikembangkan ilmuwan politik untuk menjelaskan perilaku pemilih dan kandidat dalam pemilihan umum. Adams, Merrill III, dan Grofman (2005), misalnya, mengajukan tiga model teoritis untuk memahami perilaku pemilih, yakni: model *spatial* (para pemilih termotivasi akibat serangkaian kebijakan yang ditawarkan, sedang, dan/atau dijalankan kandidat), model *behavioral*, (keputusan para pemilih tidak hanya dipengaruhi faktor kebijakan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor identifikasi partai politik, karakteristik sosio-demografis, persepsi pemilih terhadap kondisi ekonomi, evaluasi retrospektif pemilih terhadap kinerja *incumbent*) dan model *party competition* (perilaku pemilih dipengaruhi faktor loyalitas kepada partai politik, kemampuan pemilih menganalisis program-program yang ditawarkan kandidat, dan persepsi bahwa tidak ada kontestan pemilihan umum yang atraktif)

Sementara itu, Lau & Relawsk (2006: 3-46) menunjukkan lima model yang bisa digunakan untuk memahami perilaku pemilih dalam pemilihan umum, yakni: model *rational choice* (orang memilih kandidat tertentu karena terdorong untuk memenuhi kepentingan pribadinya), model *confirmatory decision making* (orang memilih kandidat tertentu karena konsistensi kognitif yang dimilikinya), model *fast and frugal decision making* (orang memilih kandidat tertentu karena faktor efisiensi pembuatan keputusan), model *semiautomatic intuitive decision making* (orang memilih kandidat tertentu karena faktor intuitif), dan model *process-oriented decision making* (orang memilih kandidat tertentu karena informasi yang diterimanya).

Terakhir, Liddle dan Mujani (2007) mengatakan, bertolak dari pengalaman Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilu Presiden 2004, bahwa perilaku pemilih di Indonesia sangat dipengaruhi faktor kepemimpinan, identitas partai politik, orientasi keagamaan, kondisi ekonomi, politik, sosiologis, dan demografis.

Selanjutnya, bagaimana dengan kontestan (*the candidates*) pemilihan umum? Ada dua arus besar pemikiran yang mempengaruhi ilmuwan politik untuk memahami perilaku kandidat dalam pemilu, yakni: *the Michigan school* yang dipengaruhi teori-teori psikologi sosial dan *the Rochester school* yang dipengaruhi teori-teori ekonomi mikro. Dengan mensintesis dua aliran pemikiran ini, Simon (2004) berpendapat bahwa perilaku pemilih dianggap deterministik karena dipengaruhi faktor-faktor tertentu dan kontestan (*the candidates*) yang dianggap sosok yang rasional (*rational actor*).

Spektrum teori di atas membantu kita untuk memahami perkembangan perilaku para pemilih dalam pemilukada. Ibarat kaca mata, model-model teoritis ini membuat kita lebih memahami realitas politik yang berkembang di lapangan. Tentu saja, kandidat tidak punya waktu untuk memahami perilaku pemilih. Yang mereka lakukan adalah bagaimana melakukan kontak, baik langsung maupun tidak langsung, seefektif mungkin dengan para

pemilih. Pada titik ini, sinergi peran lembaga survey, konsultan politik, dan tim pemenangan sangat menentukan keberhasilan kandidat dalam merespon perubahan detik per detik isu dan perilaku pemilih.

*Keempat*, mari kita gunakan model *spatial* untuk menjelaskan Pilgub Sumsel dan Pilbup OKI 2013. Awalnya, Zaitun lebih dulu memproduksi isu pemekaran OKI. Langkah ini diikuti Tartilla. Bedanya, Zaitun melempar isu ini di wilayah eks-transmigrasi, maka Tartilla melempar isu ini di wilayah pesisir. Karena keduanya melempar isu pemekaran, keduanya seimbang dan berpotensi dipilih para pemilih karena isu pemekaran yang seksi. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi isu pemekaran terhadap elektabilitas Tartilla dan Zaitun? Seberapa banyak para pemilih yang mampu mengolah isu ini dan memutuskan memilih kandidat tertentu karena isu ini? Bagaimana jika Iskandar (kandidat dari Partai Amanat Nasional) mengamini isu pemekaran wilayah eks-transmigrasi yang dilontarkan Zaitun dan mengamini isu pemekaran wilayah pesisir timur yang dilontarkan Tartilla? Maka, isu pemekaran akan semakin ramai dibicarakan, para pemilih semakin bingung, dan beban kerja tim pemenangan, lembaga survey, serta konsultan politik akan semakin berat.

Sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa setiap model teoritik memiliki keunggulan dan kelebihan tertentu. Dalam praxis pemilukada, model-model teoritik ini adalah konsumsi para elit politik. *Ending*-nya tetap pada satu titik: bagaimana mendapatkan kepercayaan politik dari para pemilih sebanyak-banyaknya dan memenangkan pemilukada tanpa mencederai proses pemilu itu sendiri.